

SKRIPSI



KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA DAMAI DI KOTA MAKASSAR

Oleh :

A. MUH. IRSYAD

B111 09 075

BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2013

HALAMAN JUDUL

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA DAMAI DI KOTA MAKASSAR



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

OLEH:

A.MUH.IRSYAD
Nomor Pokok : B111 09 075

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : A.MUH.IRSYAD
NIM : B 111 09 075
Program Kekhususan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Hukum Terhadap
Penyelesaian Pelanggaran Lalu lintas Secara
Damai di Kota Makassar

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, April 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

Pembimbing II



Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. MUH. IRSYAD

No. Pokok : B111 09 075

Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Hukum terhadap Penyelesaian Pelanggaran
Lalu Lintas Secara Damai di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan inayah-Nya sehingga segala halangan yang penulis hadapi dalam merampungkan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan berbesar hati dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Seperti kata pepatah *tiada gading yang tak retak*, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehingga penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, penulis berharap dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pengetahuan yang penulis geluti.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Drs.H.A.Umar Najamuddin,M.H.** dan **Dra. Rabiah Thamrin** yang selalu menyirami penulis dengan kasih sayangnya dan tiada henti-hentinya mendoakan penulis demi kesuksesan penulis. Teruntuk Saudara penulis **A.Rahmah Mulianty,S.H,**

A.Fadilah Yustisianty,S.H, A.Lasinrang yang selalu menemani dan member semangat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.S.,DFM. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paserangi,S.H.,M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.,selaku ketua dan sekretaris Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan;
4. Prof.Dr. Musakkir, S.H.,M.H.,dan Ratnawati, S.H.,M.H.,selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.,dan Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik;
6. Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid selaku penasehat akademik penulis;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai matakuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya;
9. AIPDA Kasman., selaku anggota satuan lalu lintas Polrestabes kota Makassar yang telah menjadi narasumber peneliti, AIPDA Leo yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang penulis butuhkan dan seluruh jajaran kepolisian Polrestabes kota Makassar yang turut membantu terlaksanannya penelitian penulis;
10. Teman-teman terbaik: A. Afrianty,S.H., Musdalifa R,S.H., Andi Winarni,S.H., Khinanty Gebi, Dewi Chaeraty Jaya,S.H., Rizky Halim Mubin,S.H., Nurul Latifah,S.H., Ananda Eka Putri, Murpratiwi S.,S.H., Akmal Lageranna, Muh. Shauman, Hadi Zulkarnaen, Arbiansyah Haseng,S.H., Prima Wibawa, Arif Fitrawan, Zakaria Anshori,S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, Yarham Hamzah, Muh.Husain Salampessi dan Desriandi Ramli, Al Faris, yang selalu menyemangati penulis selama ini;
11. Keluarga Besar LORONG HITAM yang selalu memberi kontribusi yang besar dalam keseharian penulis yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan dalam persaudaraan.
12. Terima kasih kepada Nuria Mentari Idris yang selama ini selalu member dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2010/2011;
14. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2011/2012;

15. Seluruh teman-teman angkatan Doktrin 2009;
16. Seluruh warga masyarakat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam penelitian.

Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya, amin.

Makassar, April 2013

Penulis

ABSTRAK

A.MUH.IRSYAD. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Lalu lintas Secara Damai di kota Makassar* dibimbing oleh Musakkir dan Ratnawati.

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Sejauh manakah faktor kultur, ekonomi, dan kedekatan emosional mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar (2) Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar. Etode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan perspektif melalui pendekatan empiris dan normative dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas di kota Makassar masih banyak dilakukan dengan cara damai ketimbang harus menyelesaikan pelanggaran lalu lintas sesuai prosedur yang sudah ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum..... | 7 |
| B. Fungsi hukum dalam masyarakat | 11 |
| C. Penegakan Hukum dalam Masyarakat | 13 |
| D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan | 20 |
| E. Upaya Penanggulangan Kejahatan | 28 |
| F. Kepolisian Negara Republik Indonesia | 31 |
| G. Ketentuan Hukum Lalu Lintas | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 57 |

| | |
|---|----|
| A. Lokasi Penelitian..... | 57 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 57 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 58 |
| D. Analisis Data | 58 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 59 |
| A. Gambaran Umum lokasi penelitian | 59 |
| B. Faktor Kultur, Ekonomi, dan kedekatan Emosional Mempengaruhi Perilaku Masyarakat dalam Hal Penyelesaian Pelanggaran lalu lintas Secara Damai di Kota Makassar..... | 63 |
| C. Upaya yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Untuk Menanggulangi Perilaku Masyarakat Dalam Hal Penyelesaian Pelanggaran Lalu lintas Secara Damai di Kota Makassar | 68 |
| BAB V PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |

BAB I

PEDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini perkembangan sosial masyarakat sudah sangat maju, hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang juga begitu pesatnya, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang sangat konsumtif. Keadaan ini memancing para pengusaha untuk lebih mengembangkan kreatifitasnya dalam mengembangkan teknologi terutama dalam bidang teknologi.

Bidang kehidupan yang juga tak kalah pentingnya adalah teknologi di bidang transportasi. Dengan semakin banyaknya alat transportasi saat ini menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun

perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana.¹

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²

Oleh karena itu perlu ada pengawasan yang lebih dilakukan oleh aparat dalam hal ini adalah polisi lalu lintas, yang diberi amanah untuk melakukan penegakan aturan tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam hal

¹ www.untukku.com

² Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 13

melakukan penertiban bagi masyarakat pengguna kendaraan untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum.

Pelaksanaan aturan tersebut tidak segampang itu diterima oleh masyarakat, sehingga aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus ekstra aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas, agar dapat menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan tidak buta akan aturan yang ada. Penerapan aturan tersebut masih kurang efektif karena menurut beberapa masyarakat yang Penulis temui, aturan tersebut belum tersosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan aturan tersebut.

Kebiasaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai dalam hal ini dilakukan secara kekeluargaan, inilah yang semakin berkembang dalam masyarakat saat ini, padahal masyarakat seharusnya harus diberi pengetahuan tentang aturan-aturan dalam berlalu lintas dan memberi sanksi yang tegas kepada mereka yang mengindahkan aturan tersebut. Bukan hanya pengendara yang harus diberikan sanksi, melainkan aparat itu sendiri juga harus mendapatkan sanksi serupa, karena sebagai aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang, harus menjalankan amanat tersebut sebaik mungkin bukan malah membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak taat akan aturan dengan adanya kebiasaan menyelesaikan pelanggaran secara damai, tanpa harus melalui prosedur yang ada. Dengan penegakan aturan yang baik dan benar diharapkan masyarakat dapat mengerti akan ketertiban dalam berkendara agar terciptanya kehidupan yang damai dan aman

saat berada di jalan raya dan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas.

Penulis mencoba mencari data tentang penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai ini dengan melakukan wawancara lisan kepada beberapa orang yang Penulis temui. Sebagian dari mereka mengatakan melakukan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan cara damai atau dengan cara kekeluargaan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiaran terjadinya perilaku menyimpang tersebut, misalnya saja masyarakat Indonesia yang sangat heterogen menyebabkan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Dari serangkaian permasalahan upaya penegakan hukum, hal yang paling berpengaruh adalah komitmen aparat dalam menggunakan hukum sebagai *turn of social control engineering*. Hal ini dikarenakan aparat merupakan bagian dari sistem hukum yang sangat menentukan dalam upaya pencapaian tujuan hukum, bahkan aturan hukum yang jelek sekalipun akan mampu mencapai tujuannya apabila aparat hukumnya baik, dibandingkan dengan aturan yang baik namun jika aparatnya tidak baik maka tidak akan dapat mencapai tujuan hukum, oleh karena itu yang menjadi aparat penegak hukum tidak hanya diharuskan cerdas secara intelektual melainkan juga memiliki integritas moral yang baik.³

³ www.untukku.com, diakses pada tanggal 12 desember 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka Penulis memfokuskan penelitian pada permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh manakah faktor kultur, ekonomi, dan kedekatan emosional mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar.

b. Manfaat Penulisan

1. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara damai.

2. Sebagai bahan pengetahuan agar masyarakat dapat menyelesaikan pelanggaran lalu lintas melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (*revealing*), dan (4) prediksi. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut.

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada “ apa hukumnya “ dan “ bagaimana penerapannya “. Satjipto Raharjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu

mengungkapkannya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu ?” Bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu ? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah

paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang ada.⁴

Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan menjadi bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum, pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai nonhukum.

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi menurut Gerald Turkel, adalah pada:⁵

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial,
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka,
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum,
4. tentang bagaimana hukum dibuat,

⁴ Zainuddin Ali, 2006, *sosiologi hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ *ibid*

5. tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.⁶

B. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa :⁷

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal

⁶ Achmad Ali, 1998, *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta: PT. Yarsif watampone, hlm.34

⁷ Soejono soekanto dan Mustafa abdullah,1987,sosiologi hukum dalam masyarakat, jakarta: rajawali,hlm.23

tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu :⁸

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektivitas suatu peraturan daerah dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu :⁹

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial "*a tool of social engineering*".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo Sinzheimer bahwa :¹⁰

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.

⁸ Muatafa abdullah, 1982, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, Jakarta: rajawali, hlm 14

⁹ ibid

¹⁰ Achmad ali, 1996, menguak tabir hukum, Jakarta:Chandra pratama, hlm 203

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

C. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law*

books). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-

undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.¹¹

Donald Black menginformasikan pembaca langsung bahwa perspektifnya adalah sosiologis. Dia prihatin dengan “kehidupan sosial” yang berarti bagaimana masyarakat berperilaku. Penjelasanannya itu akan menggunakan faktor sosiologis. Kira-kira, faktor sosiologis mewakili tingkat makro fitur dan dimensi sepanjang yang diselenggarakan masyarakat. Ada banyak dari mereka. Ia mengumumkan dimensi masyarakat yang akan menarik baginya:

12

1. dimensi vertikal, yang sesuai dengan status sosial ekonomi (SES) atau kelas sosial;
2. dimensi horizontal, sesuai dengan ras, suku, dan status kelahiran asli vs lahir di negeri asing;
3. budaya, sesuai dengan kesopanan;
4. struktur organisasi, jika salah satu pihak yang bersengketa atau kejahatan adalah kelompok, atau jika kedua belah pihak adalah kelompok, tingkat ukuran dan organisasi kelompok atau kelompok akan sangat penting, dan
5. kontrol sosial, yang mengacu pada cara orang mendapatkan orang lain untuk menginap sesuai tanpa menyerukan hukum.

¹¹ <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.htm>, diakses tanggal 10 desember 2012

¹² <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/17/teori-donald-black-discrimination-theory>, diakses tanggal 10 desember 2012

Black memperkenalkan dimensi vertikal masyarakat, ia mengatakan “Hukum bervariasi secara langsung dengan stratifikasi”. Black menggunakan jarak istilah untuk merujuk pada jarak sosiologis mereka dari satu sama lain. Pemisahan itu berlangsung sepanjang dimensi vertikal SES, dan ia mengacu pada ini sebagai “jarak vertikal”. Black dalam titik ini tersirat. Kejahatan memiliki arah. Jika korban SES tinggi (orang bisnis kaya) dan pelaku SES rendah (tunawisma menganggur), kejahatan memiliki arah ke atas. Anda dapat menggambarkan sebagai kejahatan atas. Hal ini diprakarsai oleh orang SES rendah terhadap milik orang SES tinggi. Hitam berbicara tentang “hukum ke atas” dan “hukum ke bawah”. Negara bertindak atas nama korban, dan menghukum pelaku. Jadi hukum akan “dari” korban “untuk” pelaku, dan itu adalah negara yang menerapkan hukum atas nama korban. Jadi jika negara adalah menghukum orang tunawisma untuk kejahatan yang dilakukan untuk orang bisnis kaya, ini adalah hukum ke bawah untuk ke atas kejahatan. Black juga mengatakan secara tersirat, Hukum berperilaku atas nama korban. Korban itu mungkin seorang individu, kelompok, organisasi, atau negara itu sendiri. Arah di mana hukum diterapkan adalah berlawanan dengan arah kejahatan itu sendiri. Jadi jika kejahatan itu “bergerak” ke atas hukum akan bergerak ke arah yang berlawanan, ke bawah. Black tergelincir dalam titik kunci yang mudah untuk mengabaikan “ke atas kejahatan lebih serius daripada kejahatan ke bawah.”

Black mengatakan “hukum ke bawah lebih besar daripada hukum ke atas” ia mengatakan bahwa jika ada suatu kejahatan ke atas, akan terlihat sebagai lebih serius, dan hukum lebih akan dikirim – beberapa lebih mungkin untuk mendapatkan ditangkap, lebih mungkin dihukum, lebih mungkin untuk mendapatkan hukuman lebih lama – karena arah hukum adalah ke bawah. Jika permusuhan antara pihak status yang lebih tinggi, hukum lebih akan dikirim. Jika antara dua pihak SES rendah, hukum mungkin sedikit akan dikirimkan. Dalam membuat titik ini, Black tampaknya membingungkan jumlah hukum yang disampaikan oleh sebuah lembaga negara, seperti polisi atau hakim, dan kemampuan orang yang berbeda untuk merasakan theseriousness berbagai kejahatan; meskipun perbedaan, bagaimanapun, ada juga kesepakatan substansial seluruh masyarakat tentang keseriusan relatif kejahatan yang berbeda. Poin penting adalah bahwa norma ada dan berlaku secara umum jika bukan anggota kelompok yang paling mematuhi itu.¹³

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini

¹³ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/17/teori-donald-black-discrimination-theory>, diakses tanggal 10 desember 2012

tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia, karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Separovic mengemukakan, bahwa :¹⁴

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu: (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi yang berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

¹⁴ Made darma weda, 1996, kriminologi, Jakarta: PT Radja grafindo persada, hlm.76

Aliran klasik timbul di Inggris, kemudian menyebarluas ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham menyebutkan bahwa *the act which i think will give me mosi plesseru*. Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh.¹⁵

Aliran kedua adalah kartographik para tokoh aliran ini antara lain Quetet dan Query. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

¹⁵ Ibid.hlm.15

Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada determinisme ekonomi. Menurut para tokoh aliran ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan.¹⁶

Aliran keempat adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini yaitu Lambrossin, Mental tester, dari psikiatrik yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut.¹⁷

Ketiga kelompok tipologi ini berbeda satu dengan yang lainnya dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa "*criminal is born not made*".¹⁸

¹⁶ G.W.Bawengan, 1974, pengantar psikologi kriminal, Jakarta: Pradnya Pamitha, hlm.32

¹⁷ Dirjosisworo Soedjono, 1994, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm.32

¹⁸ G.W.Bawengan. lock.cit

Ada beberapa proposisi yang di kemukakan oleh Lambroso, yaitu :¹⁹

1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda.
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit tanda ada bersamaan jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan di bawah tiga mungkin bukan penjahat.
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.
4. Karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindari dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
5. Penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu.

Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran *mental tester*. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut Goddard, setiap penjahat adalah orang yang *feeble mindedness* (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan kejahatan.²⁰

Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

¹⁹ Made darma weda.*op.cit*.hlm.18

²⁰ ibid

Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai *“a function of environment”*. Tema sentral aliran ini adalah *“that criminal behaviour results from the same processes as other social behaviour”*. Bahwa proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai cara.

Munculnya teori Asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi yaitu :²¹

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
- c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat.
- d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
- f) Seseorang menjadi delikuen karena defenisi-defenisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari defenisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

²¹Romli Atmasasmita, 1995, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco. Hlm.14-15

Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.²²

Menurut Tannenbaum, kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.²³

Lemert menunjukkan adanya hubungan pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. Yang diberi label sebagai orang yang radikal atau terganggu secara emosional berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya.²⁴

Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan

²² Dirdjosisworo sujono. *Op.cit.* hlm.125

²³ Romli atmasasmita. *Op.cit.* hlm.38

²⁴ Purnianti, 1980, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁵

E. Upaya penanggulangan kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :²⁶

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*

²⁵ J E.Sahetapy, 1989. *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press.

²⁶ Romli atmasmita. Op.cit

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

F. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Moylan mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:²⁷

"Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena

²⁷ Moylan S.J, 1953, *The Police of Britain*, Majalah Bayangkari No.1, hlm.4

masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "*constable*" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian "polisi", yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)".

Di samping itu istilah "*police*" dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya "The Blind Eye of History" yang mengatakan "*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*". Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.²⁸

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah "Hukum Kepolisian" adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata "Hukum" dan "Kepolisian". Jadi menurut arti tata bahasa istilah "Hukum Kepolisian" adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal—ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

²⁸ Anton Tabah, 2002, Terjemahan buku police reacean War, Jakarta: Tunggul Maju, hlm.33

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian.²⁹

Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh BPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hierarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat

²⁹ Ibid. Hlm.3

kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintara pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).

2. Tugas dan Wewenang

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandemen):

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Dibawah ini Penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku Penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represi*) dan kerjasama kepolisian

internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Polri Sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu

- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Peran Polri Sebagai Pelayan Masyarakat (*Public Service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralkan segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran-peran Polisi yang Penulis kemukakan di atas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Institusi Kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

G. Ketentuan Hukum Lalu Lintas

Dalam pasal 306 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Pasal 316 ayat (1) adalah

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298, pasal 299, pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 303, pasal 304, pasal 305, pasal 306, pasal 307, pasal 308, pasal 309, dan pasal 313 adalah pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 274 adalah :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan / atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000.,

- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 275 ayat (1) adalah :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.,

Pasal 276 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.,

Pasal 278 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga cadangan, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada

kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.,

Pasal 279 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp. 500.000.,

Pasal 280 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.,

Pasal 281 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.,

Pasal 282 adalah :

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104

ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.,

Pasal 283 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750.000.,

Pasal 284 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.,

Pasal 285 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan ke dalam alur ban sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.,

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.,

Pasal 268 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Pasal 287 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan kendaraan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 288 adalah:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000.
3. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500,000.

Pasal 289 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 290 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan dan Penumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 291 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan Penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 292 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 293 adalah:

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana di maksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.

Pasal 294 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah,tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 295 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 296 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Pasal 297 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.

Pasal 298 adalah:

Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.

Pasal 300 adalah:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000, setiap Pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur paling kiri,kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d;atau
- c. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat(1) huruf e.

Pasal 301 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 302 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengerem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian,atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.

Pasal 303 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a,huruf

b,dan huruf c dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.

Pasal 304 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain disepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp.250.000.

Pasal 305 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, paker, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a,huruf b,huruf c,huruf d,huruf e,atau huruf f,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Pasal 306 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pasal 307 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan,daya angkut,

dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana sebanyak Rp500.000.

Pasal 308 adalah:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309 adalah:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, Pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.

Pasal 313 adalah

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan dan Penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Alasan Penulis memilih penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, karena Kota Makassar adalah wilayah kerja dari Kepolisian Resort Kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang Penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

- a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para petugas Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Kota Makassar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar mengenai pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas, dan data-data yang juga diperoleh Penulis pada berbagai literatur pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan Aparat Penegak Lalu Lintas serta masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Sedangkan Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian Penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub bab ini diuraikan gambaran umum tentang wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

Kepolisian Resort Kota Besar Kota Makassar beralamatkan di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9 Kota Makassar. Luas wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar meliputi seluruh wilayah Kota Makassar yaitu 175,77 km² yang terdiri dari 14 kecamatan (Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea) dan 143 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Sumber Daya Alam dan binaan yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (kota makassar) terdiri atas ;

a. Sumber Daya Alam

- Pertanian;
- Perikanan;
- Peternakan; dan
- Kerajinan Tangan.

b. Sumber Daya Buatan

- Kawasan Industri Makassar
- Pabrik/Baja dan Minyak.

Susunan organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar didasari oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Perubahan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort dan Kepolisian Sektor. Kondisi Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar terdiri dari : MaKepolisian Resort Kota Besar 1 unit dan Polsek 12 unit dengan kekuatan personil Polri saat ini terdiri dari Polri 2.305 orang dan PNS 55 orang total Polri dan PNS = 2.360 orang. Dalam pelaksanaan tugasnya KaKepolisian Resort Kota Besar Makassar dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf maupun pelaksana utama, yaitu :

- a. Pembantu Utama KaKepolisian Resort Kota Besar : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar disingkat WakaKepolisian Resort Kota Besar
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf :
 - 1. Bagian Operasional;

2. Bagian Sumber daya;
3. Bagian Perencanaan;
4. Seksi Pengawasan;
5. Seksi Profesi dan Pengamanan;
6. Seksi Keuangan; dan
7. Seksi Umum.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok:

1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
2. Satuan Intelijen Keamanan;
3. Satuan Reserse Kriminal;
4. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
5. Satuan Pembinaan Masyarakat;
6. Satuan Samapta Bhayangkara;
7. Satuan Lalu Lintas;
8. Satuan Pengamanan Objek Vital yang;

d. Unsur Pendukung Seksi Teknologi Informasi Polri

- e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: Polsek jajaran Kepolisian Resort Kota Besar Makassar;
- f. Satuan Narkoba;
- g. Satuan Kesamaptaan;
- h. Satuan lalu lintas; dan
- i. Satuan pengamanan objek vital.

Dalam melaksanakan tugasnya Visi yang di emban Kepolisian Resort Kota Besar Makassar adalah: “Terwujudnya Pelayanan kamtibmas yang prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.”

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam Misi yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

- a. Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan segala bidang tugas kepolisian.
- b. Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesionalisme melalui program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat dan berlanjut secara konsisten.
- c. Mencegah dan menaggulangi semua bentuk kejahatan terutama perjudian, penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan jalanan (*Street Crime*).
- d. Meniadakan rasa takut dan khawatir (*Fear Of Crime*) bagi semua anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.
- e. Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum dalam semua aspek perilaku baik yang bersifat internal (bagi seluruh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar beserta keluarganya) maupun eksternal (bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar); dan
- f. Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat.

B. Faktor Kultur, Ekonomi, dan Kedekatan Emosional Mempengaruhi Perilaku Masyarakat dalam hal Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Secara Damai di Kota Makassar.

Faktor-faktor yang sering mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat yakni faktor kultur,ekonomi,kedekatan emosional dimana faktor tersebut yang sering menjadi problema dalam penegakan hukum itu sendiri dan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi dalam penegakan aturan lalu lintas khususnya yang terjadi diwilayah kerja polrestabes kota makassar. Maka dari itu penulis melakukan penelitian

menganai penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai, dan apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi upaya penegakan aturan lalu lintas di kota makassar.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar sebagai tempat penelitian Penulis yang diwakili oleh AIPDA Kasman selaku anggota polri Bagian Penilangan Satlantas Polrestabes Kota Makassar, maka Penulis dapat memperoleh informasi bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di Kota Makassar sehingga cenderung menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai yaitu faktor kemalasan dari sebagian besar masyarakat untuk melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan apabila terjadi pelanggaran. Faktor kesibukan dan sikap acuh warga masyarakat menyebabkan mereka cenderung mengambil langkah mudah dengan menyodorkan uang kepada Petugas Kepolisian untuk mempercepat urusan mereka, dalam hal ini penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan dari pada harus menandatangani Surat Tilang lalu Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mereka disita dan pada akhirnya mereka harus ke Pengadilan untuk menghadiri sidang tilang dan pada akhirnya juga harus membayar denda yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan pada tanggal 12 februari 2013 terhadap AIPDA Kasman dari Bagian Penilangan Satlantas Polrestabes Kota Makassar, menurut beliau, berdasarkan pengalaman di lapangan sebagian besar masyarakat akan lebih memilih jalur damai, karena faktor efisiensi waktu, sehingga masalah mereka selesai saat itu juga tanpa harus melalui proses persidangan. Sebab kedua duanya juga akan mengeluarkan uang, walaupun jumlah yang dibayarkan jika

diselesaikan secara damai pada umumnya lebih besar dari besar denda yang seharusnya dibayarkan, karena menurut kebiasaan masyarakat, mereka cenderung sudah memiliki standar besaran uang yang harus mereka serahkan agar masalahnya selesai saat itu juga.

Jika kita menelaah lebih jauh, tentu hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karena dengan melakukan hal seperti itu sama dengan membiasakan masyarakat melakukan suap kepada Petugas, dan Petugas yang terkait seharusnya ditindaki, karena hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kode etik dari aparat penegak hukum yang harus melakukan tugasnya dengan jujur.

Selain itu, menurut AIPDA Kasman, bagaimana pengaruh faktor kultur, ekonomi, dan kedekatan emosional terhadap perilaku masyarakat terkait penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai yang terjadi di Kota Makassar. Menurut beliau, faktor-faktor seperti faktor ekonomi tidak mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu lintas, karena ketika kita berbicara pelanggaran maka kita berbicara hukum, jadi setiap pelanggaran harus ditindak secara hukum. Seperti pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas dan dilakukan penilangan, pada saat di lapangan ditindak sesuai pelanggarannya setelah itu diarahkan ke Polrestabes surat tilangnya, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan sidang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, ditentukan waktu untuk dilakukan sidang, setelah dilimpahkan ke Pengadilan dan telah tiba tanggal sidangnya maka akan divonis berapa besar dendanya, terhadap denda tersebut ada dua alternatif yaitu bisa langsung dibayar di bank sesuai denda dari pelanggarannya bisa juga menghadiri persidangan di pengadilan. Namun fakta yang terjadi di lapangan sebagian masyarakat yang pernah melakukan penyelesaian

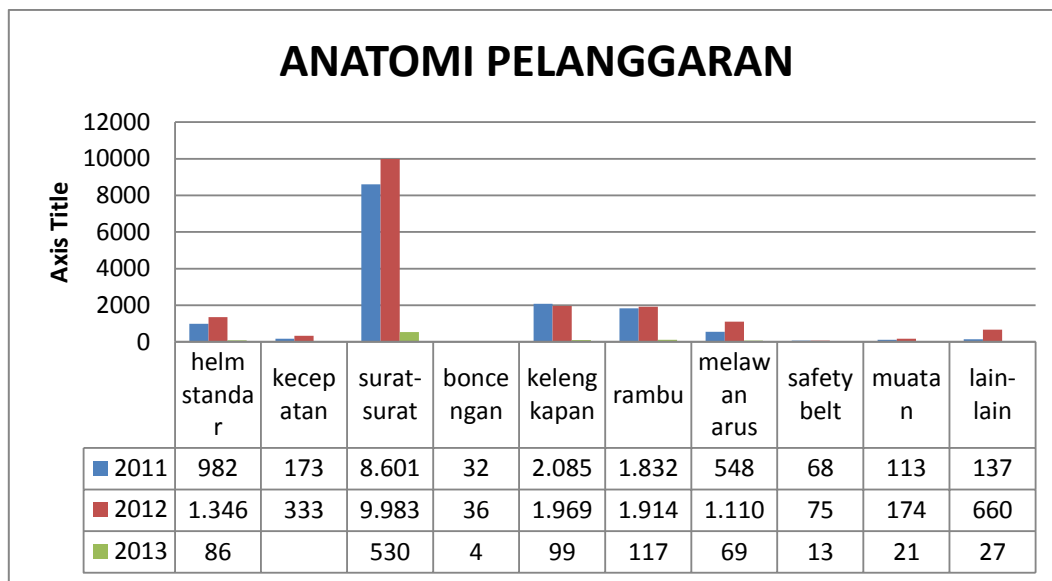
pelanggaran lalu lintas secara damai mengatakan bahwa faktor ekonomi masih begitu mempengaruhi dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus pelanggaran lalu lintas, karena masyarakat beranggapan bahwa menyelesaikan secara damai biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding harus membayar denda sesuai dengan keputusan pengadilan.

Untuk masalah kedekatan emosional antara Pelanggar dan Polisi itu sendiri sulit untuk dihindari karena tergantung Polisi yang ada di lapangan. Merekalah yang tahu apakah terhadap pelanggaran ini akan ditindak atau diberi teguran saja berupa pengarahan.

Untuk kultur masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang minim akan pengetahuan tentang aturan, disinilah Polisi berperan untuk memberikan sosialisasi agar penegakan hukum di masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik dan budaya tidak taat hukum bisa diminimalisir agar dapat menciptakan sebuah kehidupan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap segala peraturan yang ada.

Selain itu, penulis juga memperoleh data anatomi mengenai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota makassar dalam kurung waktu tiga tahun belakangan ini mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, yang penulis tuangkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 1:
Anatomi Pelanggaran



Berdasarkan grafik diatas, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota makassar cenderung mengalami peningkatan, seperti jenis pelanggaran surat-surat kendaraan yang pada tahun 2011 jumlah pelanggaran sebanyak 8.601 kasus dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 9.983 kasus, khusus di tahun 2013 pada bulan januari saja sudah terdapat 530 kasus, pelanggaran melawan arus pada tahun 2011 terdapat 548 kasus dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1.110, dan helm standar pada tahun 2011 terdapat 982 kasus dan mengalami peningkatan di tahun 2012 sebanyak 1.346 kasus. Dari beberapa kasus pelanggaran yang ada cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, yang cenderung mengalami penurunan jumlah pelanggaran adalah kasus kelengkapan kendaraan yang mengalami penurunan jumlah pelanggaran yakni pada tahun 2011 terdapat 2.085 kasus sedangkan pada tahun 2012 hanya terdapat 1.969 kasus pelanggaran.

Menanggapi data tersebut diatas penulis beranggapan bahwa tingginya pelanggaran yang terjadi tiap tahunnya itu membuktikan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada masih jauh dari apa yang diharapkan, ini membuktikan bahwa culture masyarakat khususnya kota makassar masih sulit untuk mematuhi aturan yang ada dan masih cenderung untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Penulis juga berharap agar penegakan hukum di masyarakat harus lebih baik lagi dari sekarang karena dengan melihat grafik yang cenderung mengalami peningkatan ditiap tahunnya,walaupun sudah ada yang mengalami penurunan tetapi itu hanya sebagian kecil dari pelanggaran yang semakin mengalami peningkatan, penulis juga berpendapat bahwa bukan aturannya yang terdapat kesalahan melainkan penerapan aturan tersebut belum maksimal karena ulah sebagian oknum penegak hukum itu sendiri yang belum maksimal memberikan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

C. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap aturan, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey, ada dua buah metode yang dipakai yaitu:³⁰

³⁰ Romli atmasmita, *Op.cit.* hlm.66

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

c. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan

orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Dalam hal untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka sebaiknya aparat kepolisian melakukan upaya preventif, agar masyarakat lebih tahu tentang aturan dalam berlalu lintas dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, banyak upaya yang sifatnya preventif yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya lalu lintas, baik itu berupa sosialisasi dimasyarakat atau disekolah-sekolah, karena seperti yang kita lihat, kebanyakan yang melakukan pelanggaran didominasi oleh anak sekolah, itu dikarenakan minimnya pengetahuan berlalu lintas.

Bila dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini aparat kepolisian harus menggunakan upaya represif untuk menindaki masyarakat yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi

perbuatannya lagi. Namun jika dalam penerapannya sendiri ada oknum yang masih saja melakukan pembiaran, maka sulit untuk menegakkan aturan tersebut.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 butir b Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.4168) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Maka berdasarkan pasal tersebut salah satu tugas Lembaga Kepolisian adalah menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, hal ini terkait dengan bagaimana cara penanganan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, karena hal itu sangat mempengaruhi pada pemberian efek jera kepada si Pelanggar dan masyarakat yang lain. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dengan sendirinya masyarakat akan berhati hati selama berkendara dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di jalan, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan yang berlaku.

Namun, sebelum menerapkan suatu aturan, maka sebaiknya perlu dilakukan beberapa hal agar aturan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga dalam penerapannya nanti tidak ditemukan banyak pelanggaran dengan alasan kurang pahaman dan ketidak tahuan tentang adanya aturan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan terhadap AIPDA Kasman dari Bagian Penilangan Satlantas Polrestabes Kota Makassar, menurut beliau, beberapa hal yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian Satlantas Polrestabes Kota Makassar dalam rangka memaksimalkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas telah dilakukan beberapa cara yaitu sebelum aturan itu keluar, terlebih dahulu dilakukan yang namanya sosialisasi baik lewat media elektronik, cetak, bahkan berdiri di tengah jalan dan memberikan isyarat terhadap pengendara juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi yang mereka lakukan.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian dengan menyebarkan kusioner pada masyarakat terkait dengan penyelesaian pelanggaran lalu lintas, berikut ini adalah data mengenai respon masyarakat terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota makassar yang berhasil penulis dapatkan dari beberapa masyarakat yang ada di kota makassar.

Tabel 1 :

Hasil kuesioner terkait respon masyarakat

| NO | PERTANYAAN | JAWABAN | TOTAL |
|----|--|---------------------|-------|
| 1 | Pernah tidak melakukan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai | Ya : 79 | 100 |
| | | Tidak : 21 | |
| 2 | Mengapa memilih menyelesaikan secara damai | Cepat selesai : 42 | 100 |
| | | Tidak berbelit : 23 | |

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
| | | Biaya lebih murah : 35 | |
| 3 | Tempat penyelesaian pelanggaran lalu lintas | Tempat kejadian : 67 | 100 |
| | | Kantor polisi : 20 | |
| | | Pengadilan : 13 | |
| 4 | Bagaimana respon aparat kepolisian saat anda ingin menyelesaikan secara damai | Menerima : 67 | 100 |
| | | Menolak : 33 | |
| 5 | Siapa yang menawarkan untuk menyelesaikan secara damai | Pelanggar (anda) : 72 | 100 |
| | | Polisi : 28 | |

Data primer : makassar, 20 februari 2013

Berdasarkan dari hasil kuesioner, penulis mendapatkan hasil seperti yang penulis paparkan dalam tabel di atas bahwa dari 100 responden, 79 diantaranya pernah melakukan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai dan sisanya sebanyak 21 responden mengatakan tidak pernah melakukan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai.

Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua, alasan masyarakat mengapa memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai yakni dari 100 responden 42diantaranya memilih menyelesaikan secara damai dikarenakan cepat selesai dibanding harus menunggu proses di pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, selebihnya 23 responden memilih menyelesaikan secara damai karena prosesnya tidak berbelit-belit, dan sisanya sebanyak 35 responden mengatakan bahwa

menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai biayanya lebih murah dibanding harus membayar denda yang sudah diatur dalam undang-undang.

Untuk pertanyaan ketiga, tempat yang banyak dipilih oleh responden untuk penyelesaian pelanggaran lalu lintas yakni 67 responden lebih memilih untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di tempat kejadian perkara karena lebih cepat dan tidak harus mengurus pelanggarannya ke kantor polisi apalagi sampai ke pengadilan, selanjutnya 20 responden lebih memilih penyelesaian pelanggaran lalu lintas di kantor polisi, dan sisanya sebanyak 13 responden lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di pengadilan dikarenakan responden yang memilih menyelesaikan di pengadilan memilih taat kepada prosedur yang ada.

Pertanyaan keempat mengenai bagaimana respon oknum aparat kepolisian saat responden ingin menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai, sebanyak 67 responden mengatakan bahwa oknum kepolisian yang ditawarkan responden untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai menerima tawaran responden dan selebihnya sebanyak 33 responden mengatakan bahwa oknum kepolisian yang responden tawarkan menolak untuk menyelesaikan secara damai dan memilih untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut sesuai dengan prosedur yang ada yakni memberikan surat tilang kepada si pelanggar kemudian diproses di kantor polisi unit penilangan satuan lalu lintas selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk penjatuhan vonis sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima mengenai siapa yang menawarkan untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai, 72 responden mengatakan

bahwa yang menawarkan untuk menyelesaikan pelanggaran secara damai adalah si pelanggar itu sendiri dan selebihnya sebanyak 28 responden mengatakan bahwa oknum polisi itu sendiri yang menawarkan kepelaggar untuk menyelesaikan pelanggaran secara damai.

Berdasarkan responden masyarakat berdasarkan hasil kuesioner yang penulis bagikan, penulis berpendapat bahwa penerapan aturan lalu lintas di kota makassar masih jauh dari apa yang diharapkan karena masyarakat masih lebih banyak memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai ketimbang harus menyelesaikan menurut prosedur yang ada, seperti yang tercantum dalam pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Adapun upaya yang dilakukan aparat Kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu dengan memberikan penilangan terhadap si Pelanggar, karena diharapkan dengan melakukan tindakan tilang akan memberikan efek jera terhadap si Pelanggar, disamping itu juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi terhadap aturan yang ada, terkait dengan sanksi apa yang akan mereka dapatkan apabila melanggar aturan lalu lintas yang telah diatur.

Namun segala bentuk upaya yang dilakukan baik melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas serta sanksi yang diterima oleh masyarakat apabila melakukan pelanggaran lalu lintas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu menindak dengan

tegas aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, karena jika kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa seberapa bagus suatu peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Oleh karena itu, jika dilapangan ditemukan Aparat Kepolisian menyalahgunakan wewenang yang ia miliki seperti meminta uang kepada si Pelanggar tanpa melalui prosedur yang sudah ada maka oknum aparat tersebut akan ditindak melalui sidang kode etik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Sejauh mana faktor kultur, ekonomi, dan kedekatan emosional mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota makassar sebagai berikut :
 - a. Faktor kultur masih begitu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai di kota makassar dikarenakan kultur masyarakat makassar yang cenderung lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan cara damai ketimbang harus melalui prosedur yang sudah ada.
 - b. Faktor ekonomi juga masih begitu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dikarenakan dengan cara damai tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus menunggu keputusan pengadilan.
 - c. Faktor kedekatan emosional, faktor inilah yang masih sulit untuk dihindari oleh aparat kepolisian yang ada di lapangan, karena kultur masyarakat di kota makassar masih begitu menjunjung rasa kekeluargaan sehingga sering kali dikaitkan dalam upaya penegakan

hukum dalam masyarakat khususnya penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

Penulis menarik kesimpulan bahwa ketiga faktor di atas masih begitu mempengaruhi penegakan hukum, khususnya penegakan aturan lalu lintas.

2. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota makassar yaitu :
 - a. Upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan penyelesaian pelanggaran secara damai, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas agar masyarakat sadar dan mengerti tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.
 - b. Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar terciptanya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat tidak lagi menyelesaikan pelanggaran dengan cara damai, demi terciptanya masyarakat yang taat terhadap hukum.

2. Perlunya ada perubahan dalam undang-undang lalu lintas agar pelanggaran lalu lintas yang bersifat kecil tidak lagi diproses di pengadilan melainkan diselesaikan di pos polisi agar tidak ada lagi penyelesaian secara damai karena proses yang lama, tetapi dalam penerapannya harus diawasi agar denda pelanggaran betul-betul masuk dalam kas negara bukan dimanfaatkan oleh oknum kepolisian untuk diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Chandra Pratama.
- , 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Anton Tabah, 2002, *Terjemahan Buku Police Reacean War*, Jakarta: Tunggul Maju.
- Dirjosisworo Soedjono, 1994, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito.
- G.W.Bawengan, 1974, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Pamitha.
- J.E Sahetapy, 1989, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mustafa Abdullah, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminlogi*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Moylan S.J, 1953, *The Police of Britain*, Majalah Bayangkhari No.1.
- Purnianti, 1980, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.
- , 1995, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.
- R.Otje Salman, 1992, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung:Sinar Baru.
- , 2004, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Cet. Ke-2. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso, 2002. *Polisi dan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Pusat Studi Indonesia-UT.

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

<http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.htm>, diakses tanggal 10 desember 2012

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/17/teori-donald-black-discrimination-theory>, diakses tanggal 10 desember 2012

www.untukku.com, diakses tanggal 12 desember 2012